

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI ENTITAS MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA CATERING GHANI

Bambang Setyobudi Irianto
Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman
bb.setyobudi@gmail.ac.id

Abstrak

Usaha kecil dan menengah merupakan kekuatan ekonomi yang potensial. Namun banyak usaha kecil dan menengah yang belum melakukan pencatatan akuntansi dengan baik. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini ialah untuk memberi wawasan dan contoh penerapan standar akuntansi pada usaha kecil dan menengah. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah memerlukan pendampingan dalam penerapan standar akuntansi.

Kata kunci: standar akuntansi, usaha kecil dan menengah

Abstract

Small and medium enterprises are a potential economic forces. However, many small and medium enterprises have not kept accounting records properly. The purpose of this community service is to provide insight and examples of the application of accounting standards to small and medium enterprises. The results of the community service show that small and medium enterprises need assistance in applying accounting standards.

Keywords: accounting standards, small and medium enterprises

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal tiga menyatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) akan terus menjadi ujung tombak pemerintah dalam mendorong perekonomian Indonesia karena setiap tahunnya sektor UMKM terus mengalami pertumbuhan

(Hartomo, 2019). Data per 2018 sektor UMKM menyumbang 8.400 triliun rupiah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut setara dengan 60% dari 14.000 triliun rupiah PDB di Indonesia di 2018. UMKM berhasil menyerap 121 juta tenaga kerja. Angka tersebut sekitar 96% dari serapan tenaga kerja Indonesia di 2018 yang sebesar 170 juta atau secara pertumbuhan, mengalami pertumbuhan 5% setiap tahunnya (Ikhsan, 2019).

Pertumbuhan dan perkembangan UMKM seringkali mengalami hambatan-hambatan. Hambatan tersebut terdiri dari hambatan finansial dan non finansial. Hambatan finansial merupakan hambatan dalam hal keuangan, termasuk permodalan. Banyak UMKM yang belum bisa atau 2 bahkan belum melakukan pengelolaan keuangan usaha. Hal ini menyebabkan penilaian pihak kreditor terhadap usaha tersebut dalam rangka memberikan pinjaman modal usaha masih rendah. Kreditor tidak sepenuhnya percaya dengan kondisi sebuah usaha jika belum mengetahui posisi keuangannya (Soraya dan Mahmud, 2016).

Hambatan yang paling mencolok pada sektor UMKM adalah akses pembiayaan yang masih minim (Nurhayat, 2017). Akses permodalan hingga saat ini masih menjadi kendala terbesar bagi para UMKM karena administrasi yang dipersulit dan nilai pinjaman yang terbatas (Facette, 2018). Kendala pelaku UMKM adalah sulit akses perkreditan. UMKM di Indonesia banyak dianggap tidak bankable karena pelaku UMKM masih buta terhadap laporan keuangan. Pelaku UMKM juga ada yang laporan keuangannya bercampur dengan keuangan pribadi (Arifin, 2017). Meski belum terdata secara pasti UMKM yang telah mampu menyusun laporan keuangan, setiap kali menggelar pelatihan terhadap UMKM, hanya 20% yang mampu menyusunnya (Rahayu, 2017). Pemerintah telah menyediakan program pembiayaan UMKM berupa Kredit Usaha Rakyat yang tujuannya untuk membantu UMKM untuk meningkatkan usahanya. Namun realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2015 yang ditargetkan sebesar 30 triliun rupiah tidak mencapai target (Novalius, 2016). Bank yang ditunjuk sebagai penyalur KUR sangat berhati-hati dalam penyaluran kredit karena mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai terkait kondisi UMKM 3 (Rudiantoro dan Siregar, 2012). Syarat penting untuk melakukan pinjaman dari

perbankan yaitu UMKM harus memiliki laporan keuangan (Yanto et al., 2016). Laporan keuangan yang rinci menjadi dasar perbankan untuk bisa memberikan kredit. Laporan yang sesuai dengan standar akan meningkatkan kepercayaan perbankan untuk membiayai usaha (Mahrizal, 2017). Hanya 10% UMKM yang melakukan pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan penting agar pelaku UMKM mengetahui sehat dan berkembang atau tidaknya usaha serta berpengaruh pada kelayakan memperoleh kredit modal seperti KUR dari bank (Supriadi, 2017).

Oleh karena itu perlu upaya untuk meningkatkan kinerja dan keberlangsungan UMKM. Salah satu caranya yaitu dengan memperkaya pengetahuan pelaku UMKM dalam bidang keuangan sehingga pengelolaannya bisa dipertanggungjawabkan (Yonko, 2019). Pemahaman keuangan UMKM masih sangat rendah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hanya 20% UMKM yang melek literasi keuangan. Kendala utamanya yaitu pelaku UMKM belum mampu memisahkan uang pribadi dengan uang usaha (Nurwigati, 2018).

II. Perumusan Masalah

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengesahkan standar yang diadopsi dari International Financial Reporting Standard for Small Medium Enterprises (IFRS for SMEs) yang lebih sederhana yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Namun implementasi SAK ETAP tidak maksimal. Terkait dengan hal tersebut, untuk membantu Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (EMKM) menyajikan laporan keuangan, DSAK IAI pada 24 Oktober 2016 menyusun dan mengesahkan exposure draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang berisikan konsep yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP. Kerangka pelaporan keuangan SAK EMKM diharapkan mampu menjadi pedoman pelaku UMKM untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK serta menjadi salah satu pendorong literasi keuangan UMKM di Indonesia agar memperoleh akses pembiayaan dari bank.

Pada SAK ETAP pelaporan keuangan dilakukan dengan dasar akrual sedangkan pada SAK EMKM pelaporan keuangan dilakukan dengan dasar kas (IAI, 2016). Penyusunan dan pembuatan SAK EMKM didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Melihat betapa pentingnya penerapan standar akuntansi EMKM pada usaha UKM (usaha kecil dan menengah), sehingga menarik untuk memberi wawasan dan contoh penerapan SAK EMKM kepada manajemen perusahaan kecil melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “Penerapan Standar Akuntansi EMKM (Entitas Mikro Kecil dan Menengah) Pada Catering Ghani”.

III. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara offline melalui ceramah dan simulasi pada bulan Desember 2022 di rumah catering Ghani di Desa Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Peserta dari ceramah dan simulasi ini adalah pemilik Catering Ghani.

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahapan perencanaan adalah mulai tahap perizinan ke pemilik usaha, kemudian setelah mendapatkan izin, menyusun perencanaan untuk pelaksanaan, kemudian dilanjut dengan pelaksanaan dan evaluasi akhir dari pelaksanaan pengabdian.

Penyampaian materi dalam kegiatan pengabdian ini dibagi menjadi 3 sesi, yang pertama adalah materi tentang pentingnya akuntansi, yang kedua materi tentang bagaimana standar akuntansi EMKM, dan yang ketiga adalah materi simulasi penerapan akuntansi keuangan dalam usaha kecil.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pentingnya Akuntansi

Tujuan dasar akuntansi yang asli adalah untuk mengklasifikasikan, mencatat dan menyajikan hasil keuangan dari kegiatan suatu entitas. Dengan kata lain akuntansi

adalah kartu skor yang menunjukkan bagaimana bisnis berjalan. Profesi akuntansi dan teknik akuntansi telah dikembangkan untuk digunakan dalam konteks bisnis yang lebih luas. Untuk melihat lebih dalam mengenai pentingnya dari akuntansi, kita perlu mempertimbangkan tiga pertanyaan berikut ini:

- Bagaimana keadaan perusahaan kita?
- Masalah apa yang harus diperhatikan?
- Alternatif tindakan manakah yang terbaik untuk perusahaan?

Jawaban dari ketiga pertanyaan diatas mengarah mengenai pentingnya informasi akuntansi bagi perusahaan. Jawaban pertanyaan pertama mengarah ke pentingnya pencatatan yang terjadi di perusahaan, untuk mengetahui kondisi usaha. Jawaban pertanyaan kedua mengarah ke catatan yang bisa menunjukkan hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari perusahaan. Sedang, jawaban pertanyaan ketiga mengarah pentingnya catatan informasi yang bisa menunjukkan alternatif-alternatif tindakan yang bisa dipilih perusahaan.

Akuntansi adalah bagian dari sistem informasi dalam suatu organisasi yang menjelaskan pembukuan, dan bagaimana data diidentifikasi, dicatat, dan disajikan sebagai informasi dengan cara yang diperlukan oleh pengguna informasi keuangan. Akuntansi juga berperan sebagai layanan fungsional, yang memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan memenuhi kebutuhan pengguna dari informasi keuangan. Untuk mencapai hal ini, akuntansi tidak hanya harus memastikan bahwa informasi itu akurat, andal, dan tepat waktu, tetapi juga relevan untuk tujuan penyediaannya, konsisten, dan mudah dipahami

4.2 Standar Akuntansi EMKM

UMKM terbukti mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan. Kontribusi besar UMKM meliputi penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, dan terutama menjadi penahan saat terjadinya guncangan krisis ekonomi. Melihat peran tersebut, dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak untuk mengembangkan dan mewujudkan UMKM yang maju, mandiri dan modern, termasuk memiliki akses pendanaan yang semakin luas ke sektor perbankan

(IAI, 2018:1).

Dalam rangka membantu UMKM memenuhi kebutuhan pelaporan keuangannya, DSAK IAI pada tahun 2016 telah menyusun dan mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Penerbitan SAK EMKM ini bentuk dukungan IAI sebagai organisasi profesi akuntan, dalam meningkatkan penegakan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia (IAI, 2018:1).

Pada tahun 2009, DSAK IAI telah menerbitkan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang juga diintensikan untuk digunakan oleh entitas kecil dan menengah. Namun, seiring perkembangannya, terdapat kebutuhan mengenai ketersediaan standar akuntansi yang lebih sederhana karena keterbatasan sumber daya manusia. SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh EMKM. Dasar pengukuran murni menggunakan biaya historis. EMKM cukup mencatat aset dan liabilitas sebesar biaya perolehannya. Kehadiran SAK EMKM ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan sehingga memudahkan para pelaku mendapatkan akses pendanaan dari berbagai lembaga keuangan (IAI, 2018:1).

IAI (2018:7) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan menurut SAK EMKM adalah sebagai berikut:

a. Penyajian Wajar

Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan, dan beban. Pengungkapan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK EMKM tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain atas posisi dan kinerja keuangan entitas. Penyajian wajar laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk informasi mencapai tujuan relevan, representasi tepat, keterbandingan dan keterpahaman.

b. Kepatuhan terhadap SAK EMKM

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK EMKM membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa pengecualian tentang kepatuhan terhadap SAK EMKM

dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak dapat mendeskripsikan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK EMKM, kecuali laporan keuangan tersebut telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam SAK EMKM. Laporan keuangan entitas meliputi: a) Laporan posisi keuangan pada akhir periode; b) Laporan laba rugi selama periode; c) Catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan.

c. Kelangsungan Usaha

Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen yang menggunakan SAK EMKM membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan usaha, kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan operasi atau tidak mempunyai alternatif realistis kecuali melakukan hal-hal tersebut. Jika entitas tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan fakta mengapa entitas tidak mempunyai kelangsungan usaha.

d. Frekuensi Pelaporan

Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan pada akhir setiap periode pelaporan, termasuk informasi komparatifnya.

e. Penyajian yang konsisten

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus disusun secara konsisten kecuali terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan menghasilkan penyajian yang lebih sesuai dengan mempertimbangkan kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi.

f. Informasi komparatif

Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK EMKM. Entitas memasukkan informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif yang relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

g. Materialitas

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pospos laporan keuangan adalah material jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomik pengguna laporan keuangan.

Materialitas bergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan keadaan terkait. Ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan atau gabungan dari keduanya dapat menjadi faktor penentu.

4.3 Penerapan SAK EMKM

Pelaku UMKM memerlukan sebuah pencatatan berupa laporan keuangan menurut standar dan aturan yang berlaku untuk mengetahui kinerja. Laporan ini diperlukan untuk para pengguna informasi laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan UMKM yang sesuai dengan SAK EMKM sangat penting. Jika suatu perusahaan mengajukan kredit guna menambah modal, kreditor bisa melihat kemampuan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman tersebut. UMKM yang sudah memenuhi omzet penjualannya bisa mengajukan kredit ke perbankan dengan memberikan laporan keuangan entitas yang sesuai dengan SAK EMKM per 1 Januari 2018 (Amani, 2016).

Penerapan SAK EMKM mempermudah pelaku UMKM untuk memenuhi kebutuhan stakeholders. Pelaku UMKM dapat mempertanggungjawabkan kinerja UMKM dengan bukti konkret berupa laporan keuangan yang telah sesuai dengan SAK EMKM. Tingkat kepercayaan stakeholders meningkat ketika suatu aktivitas usaha dilengkapi dengan bukti yang akurat. SAK EMKM dibuat lebih sederhana dibanding SAK ETAP agar dapat diterapkan oleh para pelaku UMKM.

Berikut adalah simulasi penerapan standar akuntansi EMKM pada perusahaan catering Ghani yang merupakan perusahaan keluarga. Pelaporan keuangan pada usaha Ghani karena merupakan UMKM maka hanya terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan rugi laba, dan catatan atas laporan keuangan.

Contoh Simulasi Penerapan SAK EMKM Perusahaan Catering Ghani

Berikut ini adalah contoh jurnal dari transaksi-transaksi pada perusahaan catering:

1. Pada tanggal 1 Januari 2021 Tuan Jaya menyetorkan uang ke dalam Ghani Catering sebesar Rp. 500.000.000 sebagai setoran modal.
2. Pada tanggal 5 Januari 2021 perusahaan membeli sebuah mobil seharga Rp.

	(10.000.000)					(10.000.000)			
18	4.000.000	(4.000.000)							
30	(200.000)						(200.000)		
Jumlah	342.800.000	1.000.000	7.500.000	-	150.000.000	-	499.800.000	5.000.000	3.500.000

Laba

1.500.000

GHANI CATERING**Laporan Laba Rugi****Tahun 2021**

Pendapatan operasional	5.000.000
Beban operasional	<u>3.500.000</u>
Laba	1.500.000

GHANI CATERING**Laporan Posisi Keuangan****Per 31 Desember 2021**

Harta		Hutang dan Modal	
Kas	342.800.000	Hutang dagang	0
Piutang	1.000.000	Hutang bank	<u>0</u>
Persediaan bh roti	7.500.000	Jumlah hutang	0
Persediaan roti	0	Modal	499.800.000
Kendaraan	<u>150.000.000</u>	Laba	<u>1.500.000</u>
Jumlah harta	501.300.000	Jumlah Hut & Mod	501.300.000

GHANI CATERING
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021

UMUM

Entitas didirikan di Purwokerto berdasarkan persetujuan anggota keluarga Suyanto pada tanggal 1 Januari 2015 dan mendapatkan persetujuan dari orang tua kedua belah pihak. Entitas bergerak dalam bidang usaha catering. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008. Entitas berdomisili di Jalan Jalak, Sumampir, Purwokerto.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan keuangan UMKM ini adalah Rupiah.

Piutang usaha

Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan.

Persediaan

Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian dan biaya angkut pembelian. Biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan overhead. Overhead tetap dialokasikan ke biaya konversi berdasarkan kapasitas produksi normal. Overhead variabel dialokasikan pada unit produksi berdasarkan penggunaan aktual fasilitas produksi. Entitas menggunakan rumus biaya persediaan rata-rata.

Aset Tetap

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan penjualan diakui ketika tagihan diterbitkan atau pengiriman dilakukan kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadi

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat mengenai Penerapan SAK EMKM di Catering Ghani dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laporan SAK EMKM untuk usaha kecil meliputi laporan rugi laba, laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan.
2. Prinsip akuntansi dalam pencatatan adalah biaya historis atau biaya yang telah terjadi.
3. Semua kegiatan akuntansi Catering Ghani masih dilakukan secara manual oleh pemiliknya

5.2 Saran

Berdasarkan evaluasi pengabdian dan kesimpulan tentang penerapan SAK EMKM diajukan saran: perlunya pendampingan dalam pembuatan laporan akuntansi dikarenakan pemilik bukanlah orang yang memiliki latar belakang akuntansi, sehingga masih sering keliru dalam melakukan pencatatan transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amani, F. A., (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Opini Audit dan Umur Perusahaan Terhadap Audit Delay. *Jurnal Nominal Universitas Negeri Yogyakarta*, 5(1) 135-150.
- Arifin, N. (2017, Mei 23). Aduh! Masih Banyak Pelaku UMKM Buta Laporan Keuangan. Diakses 28 Oktober 2019, dari okezone: <https://www.okezone.com>
- Facette, F. F. (2018, Februari 2). Masalah Modal Dinilai Jadi Kendala Utama Pengusaha UMKM. Diakses 28 Oktober 2019, dari Jawapos: <https://www.jawapos.com>
- Hartomo, G. (2019, Juni 19). UMKM Sumbang Rp. 8.400 Triliun ke Perekonomian Nasional pada 2018. Diakses 28 Oktober 2019, dari Okezone: <https://www.okezone.com>
- IAI. (2018). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah. Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta.
- Ikhsan, M. I. (2019, Juni 19). UMKM Sumbang Rp. 8.400 Triliun ke Perekonomian Nasional pada 2018. Diakses 28 Oktober 2019, dari Okezone: <https://www.okezone.com>
- Mahrizal, V. (2017, Oktober 25). 80% UMKM Belum Mampu Susun Laporan Keuangan. Diakses 28 Oktober 2019, dari TribunJogja: <https://www.TribunJogja.com>
- Novalius, F (2016, Januari 5). Realisasi Penyaluran KUR 2015 Cuma Sentuh 75,8%. Diakses 28 Oktober 2019, dari Okezone: <https://www.okezone.com>
- Nurhayat, W. (2017, Agustus 29). Hambatan UMKM di Indonesia: Modal Terbatas Hingga Sulit Mencari Pasar. Diakses 28 Oktober 2019, dari Kumparan: <https://www.kumparan.com>
- Nurwigati, K. (2018, April 18). Duh, Baru 20% Pelaku UMKM di Jogja Melek Literasi Keuangan. Diakses 20 April 2020, dari HarianJogja: <https://www.harianjogja.com>
- Rahayu, S. (2017, Oktober 25). 80% UMKM Belum Mampu Susun Laporan Keuangan. Diakses 28 Oktober 2019, dari TribunJogja: <https://www.TribunJogja.com>
- Rudiantoro, S dan Siregar, V. (2012). Kualitas Laporan UMKM serta Prospek Implementasi SAK ETAP. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 12(1) 1-21
- Soraya, A. E. dan Mahmud, A. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. *Accounting Analysis Journal*. 5(1)1-8

- Supriyadi, H. (2017, Mei 23). Aduh! Masih Banyak Pelaku UMKM Buta Laporan Keuangan. Diakses 28 Oktober 2019, dari okezone: <https://www.okezone.com>
- Yanto, H., Bestari D. H., Badingatus, S., dan Joseph, M. (2016). The Behaviour of Indonesian SMEs in Accepting Financial Accounting Standards Without Public Accountability. *International. Journal of Business and Management Science*, 6(1) 43-62.
- Yonko, S. (2019, November 12). Pentingnya Literasi Keuangan Bagi UMKM. Diakses 20 April 2020, dari kompasiana: <https://www.kompasiana.co>

